



## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN RELOKASI GAMPONG TIMBANG LANGSA KOTA LANGSA

Mhd Arief Diana <sup>a,\*</sup>, Muttaqin Hasan<sup>b</sup>, Mochammad Afifuddin<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

<sup>b</sup>Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

\*Corresponding author; email address: mhdariefdiana2018@gmail.com

| ARTICLE INFO                                                                                                                                                                                                                          | ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Article History:</i><br/>Received 09 July 2022<br/>Accepted 15 October 2022<br/>Online 30 Decemnr 2022</p> <p><i>Keywords:</i><br/>Participation<br/>Development<br/>Planning<br/>Community<br/>Settlements<br/>Langsa City</p> | <p>The Langsa City Government carried out a relocation program on slums that stood in state-owned areas and slums on the riverbanks. Relocation steps are carried out to avoid an unhealthy lifestyle in the slums, as well as avoid natural disasters caused by overflowing rivers and landslides on riverbanks. The implementation of the settlement relocation program is expected to have a good impact. The purpose of the study is to analyze and describe the development planning process that has been implemented under community expectations and how the level of community participation in the development planning process and identify the factors that cause the community to not optimally follow the development planning process. This research uses a descriptive qualitative method approach. The object of this study is the villages of Paya Bujuk Blang Pase, Blang, Paya Bujuk Bramo, Sungai Pauh. The study sample was 99 respondents. Data collection was carried out with questionnaires and interviews. Sampling using Random Sampling Technique. The sample chosen is the relocated community. Based on the perception of respondent I, the overall average value of the respondent's answer was obtained, which was 72.26%. which means that the development planning process that has been carried out is largely following the expectations of the community. Based on the perception of respondent II, the overall average value of the respondent's answer was 81%, where the level of community participation in the development planning process was almost entirely appropriate / represented by all groups of people. The results of interviews with stakeholders concluded that the community had optimally followed the development planning process. However, after conducting research, there are obstacle factors, namely factors of knowledge and education that are still low, factors of community work that take up a lot of time, and the lack of openness of development actors in organizing development who consider the community to be only an object of development.</p> |

©2022 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

### 1. PENDAHULUAN

Pengembangan permukiman dapat dilakukan dengan relokasi. Relokasi dilakukan pada permukiman kumuh yang berdiri dilahan milik negara dan permukiman kumuh di bantaran sungai. Langkah relokasi ini dilakukan untuk menghindari pola hidup tidak sehat dari permukiman kumuh tersebut serta menghindari korban bencana alam di sebabkan meluapnya aliran sungai dan longsor pada bantaran sungai. Beberapa desa yang direlokasi oleh Pemerintah Kota Langsa adalah Paya Bujuk Blang Pase, Gampong Blang, Paya Bujuk Bramo, dan Gampong Sungai Pauh.

Dalam pelaksanaan program relokasi permukiman diharapkan dapat memiliki dampak baik dari kondisi sebelum direlokasi maupun kondisi setelah direlokasi. Kondisi yang lebih baik tersebut meliputi

kondisi fisik permukiman sosial maupun ekonomi masyarakat, sehingga dapat tercipta kawasan yang sesuai harapan masyarakat Kota Langsa dan masyarakat yang direlokasi. Pelaksanaan relokasi sering kali dijumpai banyak kendala dalam setiap tahapannya, dan salah satunya yaitu perencanaan secara ideal pembangunan kawasan relokasi haruslah melibatkan partisipasi masyarakat dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, namun keinginan ini seringkali tidak tercapai karena berbagai kendala dan keterbatasannya.

Demi tercapainya tujuan pembangunan dapat terwujud maka peran serta dan kerjasama dari seluruh masyarakat yang ada sangatlah dibutuhkan, karena salah satu faktor yang menentukan dalam terlaksananya suatu pembangunan adalah faktor sumber daya manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Melalui pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat ini akan dapat dilaksanakan pembangunan kawasan yang sesuai dengan harapan masyarakat yang direlokasi.

Menurut Wijaya (2001), suatu perencanaan pembangunan dikatakan partisipatif bila memenuhi ciri-ciri, yaitu: 1) terfokus pada kepentingan masyarakat dengan melakukan pembangunan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak terjadi perselisihan antara pengguna dan perancang; 2) partisipatoris, yaitu ikut serta dalam merancang dengan memberikan ide-ide agar tercapai apa yang ditargetkan; 3) sinergitas, yaitu saling bahu membahu dalam membangun; 4) legalitas, setiap yang direncanakan harus memiliki legalitas dari pihak terkait.

Masyarakat yang terkena relokasi umumnya yaitu masyarakat yang tinggal di lahan permukiman milik PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) yang dulunya stasiun kereta api yang tersebar di sepanjang jalan lintasan rel kereta api pada daerah Kota Langsa dan beberapa kawasan lain seperti di bantaran sungai. Relokasi di Kota Langsa dilakukan dengan memberi bantuan berupa lahan pinjam pakai dan beberapa rumah hunian yang telah di bangun yang terletak di Gampong Timbang Langsa. Sehingga kita perlu melakukan studi yang merujuk pada tujuan perencanaan pembangunan kawasan tersebut sehingga dapat sesuai seperti harapan masyarakat.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

Menurut Deviyanti (2013), Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah dapat diartikan sebagai sebuah proses penyusunan rencana yang melibatkan seluruh pihak/*stakeholders*, baik pemerintah, masyarakat, swasta, LSM, perguruan tinggi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses pembangunan. Pelibatan seluruh pihak *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan partisipatif adalah dalam rangka menyaring, menyerap dan mendapatkan aspirasi, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan.

Perencanaan pembangunan akan tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Kartasasmita (1997), pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam pembangunan Nasional. Masyarakat perlu dilibatkan langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran.

Proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku Soetomo (2008). Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat 4 (empat) pasal Undang-Undang, yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7. Sistem perencanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-down* (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif.

## 2.2 Relokasi

Relokasi menurut terjemahan kamus Bahasa Indonesia dalam Umbara (2003) merupakan proses pemindahan penduduk dari lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi baru yang disiapkan sesuai peruntukankota. Ridlo juga menawarkan prosedur yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan relokasi yaitu: pendekatan interaktif kepada masyarakat yang terkena relokasi, dalam rangka menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut.

Menurut Rosenfeld (2013), relokasi perumahan adalah produk sampingan penting dari upaya kontemporer untuk menanggapi ekonomi global dan perubahan lingkungan. Pembongkaran perumahan skala besar semakin menjadi respon negara terhadap tekanan membuat daerah perkotaan cocok untuk masa depan. Relokasi perumahan menjadi aspek yang paling kompleks dari regenerasi dan pembangunan kota karena akan menimbulkan resiko munculnya masalah sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan yang tinggi.

## 2.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik (Deviyanti, 2013) Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana- rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat berada pada tahap pemilihan alternatif kebijakan dan program sementara penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan dilakukan secara bersama dengan perencanaan. Adanya partisipasi masyarakat dalam penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan secara bersama antara masyarakat dan perencana. Menurut Koontz dan O'Donnell (2006) partisipasi merupakan input sekaligus sekaligus sebagai ekspresi dan aspirasi masyarakat.

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, akan di jelaskan sebagai berikut;

### 1. Faktor internal

Menurut Margono (2003), untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. Sedangkan,

### 2. Faktor eksternal

Menurut Sunarti (2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholders*), yaitu *stakeholders* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah. pengurus desa/kelurahan (RT/RW). Tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

## 2.4 Perencanaan Pembangunan

Menurut Nur dkk (2011), perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas, tanpa melihat realita di lapangan. Data yang valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan di dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Maka dengan demikian perencanaan pembangunan dapat di artikan sebagai suatu proses

perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang berdasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik bersifat fisik (mental spriritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 tahun 1982, pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses yang relatif baku yaitu Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan (P5D). Contoh dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Tujuan, Agenda, Keluaran, dan Peserta pada tiap Tahapan P5D

| Tahapan                                   | Agenda                                                                                                                                                                                                                                                           | Peserta                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musrembangdes/<br>Musrembang<br>kelurahan | 1. Mengidentifikasi potensi dan masalah kunci kerja<br>2. Perumusan dan Komolikasi hasil-hasil Musrembang<br>3. Prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan<br>4. Pemilahan/kategori kegiatan berdasarkan sumber pendanaan                                     | Kepala Desa, LKMD,<br>BPD, Kadus, PKK,<br>Karang Taruna,<br>Tokoh, Masyarakat,<br>Anggota            |
| Diskusi<br>UDKP/Musrembang<br>Kecamatan   | 1. Identifikasi dan komplasi hasil-hasil musrembang kecamatan<br>2. Prioritas usulan kegiatan pembangunan<br>3. Pemilahan kategori kegiatan berdasarkan sumber pendanaan                                                                                         | Dinas Badan Lembaga<br>tingkat Kecamatan,<br>Camat Muspika<br>Kades/Lurah, Ketua<br>LKMD, Ketua BPD. |
| Rakorbang<br>Kabupaten                    | 1. Identifikasi dan komplasi hasil-hasil musrembang kecamatan<br>2. Identifikasi dan Kompilasi daftar usulan proyek (DUKP)<br>Dinas/Instansi.<br>3. Prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan<br>4. Pemilahan/kategori kegiatan berdasarkan sumber pendanaan | Dinas Bbadan<br>Lembaga Tingkat<br>Kabupaten, Bupati,<br>Muspida, Camat PKK.                         |

Sumber : Permendagri (1982)

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa observasi, kuisisioner dan data pendukung lainnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah 14948 masyarakat, sedangkan sampel adalah sebanyak 99 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *random sampling*, dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak sehingga setiap sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih

#### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengukuran jawaban kuesioner menggunakan skala Likert. Pengumpulan data kuesioner dilakukan dengan menjumpai langsung tempat keberadaan responden dan memberikan formulir kuesioner. Responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang telah disediakan pada formulir kuesioner dengan memberikan *checklist* (✓). Pembagian kuesioner dilakukan pendampingan, agar bila terdapat pertanyaan yang sulit dimengerti oleh responden dapat diberikan penjelasan. Pengumpulan data kuesioner ini dilakukan dalam rentang waktu 1 bulan.

#### 3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, penyajian data dan analisis data digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Arikunto (2006) berpendapat bahwa data dari deskriptif persentase agar mudah dianalisis, maka dapat digunakan pedoman penafsiran data seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Interval Penafsiran Data

| No. | Interval Nilai | Penafsiran Data   |
|-----|----------------|-------------------|
| 1   | 0%             | Tidak satupun     |
| 2   | 1% – 26%       | Sebagian kecil    |
| 3   | 27% – 49%      | Hampir setengah   |
| 4   | 50%            | Setengahnya       |
| 5   | 51% – 75%      | Sebagian besar    |
| 6   | 76% – 99%      | Hampir seluruhnya |
| 7   | 100%           | Seluruhnya        |

Sumber: Arikunto (2006)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Persepsi Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Adapun penjelasan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan dapat dijelaskan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Persepsi Responden I

| No. | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                           | Pilihan Jawaban |    |    |    |     | Rata-rata |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|-----|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                      | SS              | S  | KS | TS | STS |           |
| 1.  | Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada program dalam menghadiri musrembang yang di adakan di kecamatan. Apakah semua masyarakat boleh hadir                                                     | 21              | 46 | 26 | 6  | 0   | 3.82      |
| 2.  | Usulan kegiatan dari desa yang dibawa ke tingkat kecamatan (musrembang) adalah usulan yang diajukan oleh pihak tokoh masyarakat setempat tetapi bukan karena dari hasil usulan dari masyarakat                                       | 12              | 62 | 25 | 0  | 0   | 3.86      |
| 3.  | Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat                                                                            | 18              | 55 | 24 | 2  | 0   | 3.89      |
| 4.  | Bagaimana dengan wakil masyarakat dari desa yang menghadiri musrembang kecamatan apakah diundang secara bergiliran atau hanya orang terdekat dari tokoh masyarakat (kepala desa)                                                     | 9               | 38 | 43 | 9  | 0   | 3.47      |
| 5.  | Usulan kegiatan dari desa yang ingin dibawa ke tingkat kecamatan (musrembang) adalah usulan yang diajukan oleh pihak tokoh masyarakat ke tempat tetapi bukan karena dari hasil usulan dari masyarakat                                | 8               | 50 | 37 | 4  | 0   | 3.62      |
| 6.  | Bagaimana tingkat kehadiran partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan, apakah banyak yang tidak bisa hadir karena kesibukannya masing-masing, sehingga sering yang jadi wakil dari masyarakat hanya tokoh masyarakat saja  | 21              | 45 | 26 | 6  | 0   | 3.82      |
| 7.  | Mengapa yang menghadiri musyawarah kebiasaan adalah orang yang sama hadir dalam musyawarah setiap tahun, apakah di desa masyarakat banyak yang belum bisa baca tulis                                                                 | 17              | 60 | 16 | 6  | 0   | 3.88      |
| 8.  | Apakah lahir usulan desa dari musyawarah penggalan gagasan lalu musyawarah dusun ditetapkan pada saat musyawarah desa. Atau usulan tersebut lahir dari musyawarah tokoh masyarakat sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat | 11              | 62 | 25 | 1  | 0   | 3.83      |
| 9.  | Bagaimana proses penyusunan rencana, apakah melibatkan seluruh pihak/ <i>stakeholders</i> , bagaimana pemerintah, masyarakat, swasta, LSM, perguruan tinggi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses pembangunan      | 7               | 66 | 25 | 1  | 0   | 3.79      |

| No. | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pilihan Jawaban |    |    |    |     | Rata-rata |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|-----|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SS              | S  | KS | TS | STS |           |
| 10  | Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia                                                                                                                                                                                                                       | 4               | 64 | 31 | 0  | 0   | 3.72      |
| 11  | Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta                                                                                                                                                                  | 21              | 46 | 26 | 6  | 0   | 3.82      |
| 12  | Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada diwilayahnya | 21              | 46 | 26 | 6  | 0   | 3.82      |
| 13  | Partispasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat                                                                                                                                                                                                             | 7               | 49 | 36 | 7  | 0   | 3.56      |
| 14  | Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut                                                            | 6               | 55 | 35 | 2  | 1   | 3.63      |
| 15  | Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan                                                                                                                                                                                            | 2               | 43 | 45 | 8  | 1   | 3.37      |
| 16  | Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri                        | 21              | 46 | 26 | 6  | 0   | 3.82      |
| 17  | Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan                                                                                                                                                                 | 21              | 44 | 27 | 7  | 0   | 3.79      |
| 18  | Kendala internal masyarakat kurang mempunyai inisiatif                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20              | 46 | 27 | 6  | 0   | 3.80      |
| 19  | Kendala internal masyarakat mengharapakan adanya pemberian insentif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 60 | 32 | 1  | 0   | 3.71      |
| 20  | Kendala internal terdapat pada sebagian masyarakat yang tidak mau mengorbankan sebagian miliknya (menghibahkan) untuk kepentingan bersama                                                                                                                                                                                             | 7               | 54 | 38 | 0  | 0   | 3.68      |
| 21  | Kendala internal masyarakat tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan                                                                                                                                                                                        | 20              | 46 | 27 | 6  | 0   | 3.80      |
| 22  | Kendala internal masyarakat terutama wanita merasa bahwa dirinya bukan bagian dari anggota musyawarah dalam pengambilan keputusan, sehingga tetap diadakan pertemuan didesa atau di kecamatan jarang menghadiri pertemuan                                                                                                             | 2               | 36 | 59 | 2  | 0   | 3.38      |
| 23  | Kendala internal masyarakat kurang peduli dan merasa kurang penting disetiap pertemuan, sehingga yang menghadiri pertemuan hanya tokoh-tokoh masyarakat ( <i>stakeholders</i> )                                                                                                                                                       | 19              | 48 | 46 | 6  | 0   | 3.80      |
| 24  | Kendala internal masyarakat kurang memiliki kapasitas serta keahlian dalam pelaksanaan kegiatan didesa tidak melibatkan dan melibatkan diri sehingga hasil dari pelaksanaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat                                                                                                                    | 18              | 55 | 23 | 3  | 0   | 3.88      |
| 25  | Kebijakan eksternal tidak ada kesepakatan dengan masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan, kebutuhan tersebut tidak langsung memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat                                                                                                                                                                 | 13              | 59 | 26 | 1  | 0   | 3.84      |
| 26  | Kendala eksternal kebijakan masyarakat yang belum sepenuhnya berorientasi pada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembangunan                                                                                                                                                                              | 17              | 62 | 19 | 1  | 0   | 3.95      |
| 27  | Kendala eksternal kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses pembangunan yang menganggap masyarakat hanya sekedar objek pembangunan                                                                                                                                                                      | 19              | 48 | 26 | 6  | 0   | 3.80      |
| 28  | Kendala eksternal masih rendahnya upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang program pembangunan yang                                                                                                                                                                                                                        | 14              | 60 | 24 | 1  | 0   | 3.87      |

| No.                   | Pertanyaan                                                                                                                           | Pilihan Jawaban |    |    |    |     | Rata-rata |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|-----|-----------|
|                       |                                                                                                                                      | SS              | S  | KS | TS | STS |           |
|                       | dilaksanakan sehingga masyarakat merasa pembangunan tersebut tidak memperhatikan aspirasinya                                         |                 |    |    |    |     |           |
| 29                    | Kendala eksternal instrumen hukum tidak mengatur secara eksplisit bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam keputusan publik | 19              | 48 | 24 | 8  | 0   | 3.78      |
| 30                    | Kendala eksternal pemimpin yang tidak mempunyai pengaruh dan pasif dalam mengambil inisiatif untuk memulai kegiatan partisipasi      | 11              | 66 | 21 | 1  | 0   | 3.87      |
| Rata-Rata Keseluruhan |                                                                                                                                      |                 |    |    |    |     | 3,76      |

Menurut hasil Tabel 3 di atas diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.76 atau 75.2%. Nilai tersebut berada pada interval 51% – 75% dengan kategori sebahagian besar.

#### 4.2 Persepsi Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Adapun item pertanyaan dan jawaban responden mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ini dijelaskan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Persepsi Responden II

| No. | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pilihan Jawaban |    |    |    |     | Rata-rata |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|-----|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SS              | S  | KS | TS | STS |           |
| 1.  | Semua masyarakat berpartisipasi dan boleh menghadiri musrembang yang di adakan di kecamatan                                                                                                                                                                                                            | 16              | 61 | 21 | 1  | 0   | 3.92      |
| 2.  | Perencanaan pembangunan akan tepat sesuai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat!                                                                                                                                               | 17              | 58 | 23 | 1  | 0   | 3.91      |
| 3.  | Wakil masyarakat dari desa yang menghadiri musrembang di kecamatan di undang secara bergiliran atau hanya orang terdekat dari tokoh masyarakat (Kepala desa)                                                                                                                                           | 16              | 55 | 21 | 7  | 0   | 3.80      |
| 4.  | Partisipasi masyarakat merupakan salah satu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat                                                                                                                                                                  | 5               | 46 | 25 | 21 | 2   | 3.31      |
| 5.  | Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai salah satu proses perumusan alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta                                                                                                                                         | 8               | 50 | 30 | 11 | 0   | 3.55      |
| 6.  | Biasanya yang menghadiri musyawarah adalah orang yang sama setiap tahun, karena didesa masyarakat banyak yang belum bisa baca tulis                                                                                                                                                                    | 7               | 60 | 30 | 2  | 0   | 3.72      |
| 7.  | Lahir usulan desa dari musyawarah penggalan gagasan lalu musyawarah dusun dan ditetapkan pada saat musyawarah desa                                                                                                                                                                                     | 14              | 58 | 26 | 1  | 0   | 3.85      |
| 8.  | Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia                                                                                                                                                                                        | 12              | 50 | 37 | 0  | 0   | 3.74      |
| 9.  | Proses penyusunan rencana melibatkan seluruh pihak/stakeholder, baik pemerinth, masyarakat, swasta, LSM, Perguruan Tinggi, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses pembangunan                                                                                                         | 7               | 64 | 25 | 3  | 0   | 3.75      |
| 10. | Usulan kegiatan dari desa dibawa ke tingkat kecamatan (musrembang) adalah usulan yang di ajukan oleh pihak tokoh masyarakat setempat tetapi bukan karena dari hasil dari usulan masyarakat                                                                                                             | 10              | 59 | 24 | 2  | 4   | 3.69      |
| 11. | Tingkat kehadiran partisipasi masyarakat dalam musrembang, banyak yang tidak bisa hadir karena kesibukannya masing-masing, sehingga sering yang jadi wakil dari masyarakat hanya tokoh masyarakat saja                                                                                                 | 3               | 48 | 44 | 4  | 0   | 3.50      |
| 12. | Untuk mendapatkan hasil yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya | 7               | 59 | 26 | 7  | 3   | 3.57      |
| 13. | Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya,                                                                                                                                                                           | 9               | 48 | 37 | 5  | 0   | 3.61      |

| No.                   | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pilihan Jawaban |    |    |    |     | Rata-rata |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|-----|-----------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SS              | S  | KS | TS | STS |           |
|                       | karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut                                                                                                                                     |                 |    |    |    |     |           |
| 14                    | Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan | 8               | 52 | 35 | 4  | 0   | 3.64      |
| 15                    | Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan                                                                                                                       | 10              | 54 | 27 | 7  | 1   | 3.65      |
| 16                    | Kendala internal masyarakat mengharapkan adanya pemberian insentif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan di desa dan di kecamatan                                                                                                                                                  | 18              | 46 | 28 | 7  | 0   | 3.75      |
| 17                    | Kendala internal terdapat sebagian masyarakat yang tidak mau mengorbankan sebagian miliknya (menghibahkan) untuk kepentingan bersama                                                                                                                                              | 15              | 46 | 33 | 5  | 0   | 3.71      |
| 18                    | Kendala internal masyarakat terutama wanita bahwa dirinya bukan bagian dari anggota musyawarah dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap diadakan pertemuan didesa atau di kecamatan jarang menghadiri pertemuan                                                               | 7               | 50 | 37 | 5  | 0   | 3.59      |
| 19                    | Kendala internal masyarakat kurang peduli dan merasa kurang penting disetiap pertemuan, sehingga yang menghadiri pertemuan hanya tokoh-tokoh masyarakat ( <i>stakeholders</i> )                                                                                                   | 13              | 56 | 30 | 0  | 0   | 3.82      |
| 20                    | Kendala internal masyarakat yang kurang memiliki kapasitas serta keahlian dalam pelaksanaan kegiatan didesa tidak dilibatkan dan melibatkan diri sehingga hasil dari pelaksanaan pembangunan tidak sesuai harapan masyarakat                                                      | 24              | 40 | 35 | 0  | 0   | 3.88      |
| 21                    | Kendala eksternal tidak ada kesepakatan masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan, kebutuhan tersebut tidak langsung mempengaruhi kebutuhan dasar anggota masyarakat                                                                                                                  | 7               | 46 | 46 | 0  | 0   | 3.60      |
| 22                    | Kendala eksternal kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses pembangunan yang menganggap masyarakat hanya sekedar objek pembangunan                                                                                                                  | 5               | 36 | 58 | 0  | 0   | 3.46      |
| 23                    | Kendala eksternal masih rendahnya upaya pemerintah memberikan informasi tentang program pembangunan yang dilaksanakan                                                                                                                                                             | 21              | 30 | 48 | 0  | 0   | 3.72      |
| 24                    | Kendala eksternal instrumen hukum tidak mengatur secara eksplit bagaimana dimana dan siapa yang dilibatkan dalam keputusan publik                                                                                                                                                 | 17              | 34 | 48 | 0  | 0   | 3.68      |
| 25                    | Kendala eksternal pemimpin yang tidak mempunyai pengaruh dan pasif dalam mengambil inisiatif untuk memulai kegiatan partisipasi                                                                                                                                                   | 14              | 48 | 37 | 0  | 0   | 3.76      |
| Rata-Rata Keseluruhan |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |    |    |    |     | 4,05      |

Menurut hasil Tabel 4 diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4.05 atau 81%. Nilai tersebut berada pada interval 76% – 99% dengan kategori hampir seluruhnya.

### 4.3 Hasil Wawancara dengan *Stakeholder*

Bagian ini akan menyajikan menyajikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam peroses perencanaan. Menurut *stakeholder* bernama Sofyan Ridwan selaku sekretaris Camat, perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Segala proses yang telah dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat” imbuhnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Riko Septiadi selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Langsa Baro dimana perencanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat “perencanaan yang sudah dilakukan menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan, tentunya masyarakat memerlukan lingkungan

yang aman dan pemerintah telah menyediakannya” imbuhnya. Bapak Sofyan juga mengatakan bahwa perencanaan yang berjalan sudah transparan.

Namun pada proses Musrembang, Bapak Sofyan mengatakan bahwa semua unsur masyarakat hadir dan memiliki hak dalam memberikan pendapat. “Saya rasa musrembang yang berjalan kemarin sudah dihadiri oleh semua elemen masyarakat. Dalam prosesnya pun masyarakat diberikan hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat” tambahnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Khairul Anwar selaku Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dimana pada proses musyawarah, semua unsur masyarakat turut diundang dalam memberikan pandangannya. “Musyawarah yang sudah berjalan belum mengikutsertakan semua elemen masyarakat dan masyarakat sudah diberikan hak dalam memberikan pendapat” tambahnya.

Bapak Khairul Anwar juga menjelaskan bahwa selama proses perencanaan pembangunan, tidak ada hambatan para stakeholder dalam memberikan intruksi. Bapak Riko Septiadi juga mengatakan hal yang sama, “Koordinasi yang sudah berjalan sudah sangat baik dan tidak ada hambatan dalam proses perencanaan pembangunan ini”. Selain itu, menurut Bapak Sofyan proses perencanaan yang berjalan juga sudah menjunjung etika dan tata nilai masyarakat, di mana “Perencanaan yang sudah berjalan tentunya berjalan dengan menjunjung tinggi persatuan dan kemaslahatan umat”. Bapak Khairul Anwar menyatakan bahwa segala proses perencanaan pembangunan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Proses perencanaan pembangunan tidak cacat hukum dan sudah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004” imbuhnya. Senada dengan Bapak Khairul Anwar, Bapak Sofyan dan Bapak Riko Septiadi juga menyatakan bahwa segala proses perencanaan pembangunan ini sudah sesuai undang-undang “Proses perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004” imbuhnya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan persepsi responden I, dimana diperoleh nilai rata-rata keseluruhan dari jawaban responden yaitu sebesar 72.26%. Nilai tersebut berada pada interval 51%-75% dengan kategori sebahagian besar (Tabel 2), yang berarti proses perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan sebahagian besar sudah sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Berdasarkan persepsi responden II, dimana diperoleh nilai rata-rata keseluruhan dari jawaban responden yaitu sebesar 4.05 atau 81%, dengan kategori hampir seluruhnya. yang mana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan hampir seluruhnya sudah sesuai/terwakili dari semua golongan masyarakat.
3. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak stakeholder maka disimpulkan bahwa masyarakat sudah optimal mengikuti proses perencanaan pembangunan. Namun setelah dilakukan penelitian, terdapat beberapa faktor kendala tidak optimalnya masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan diantaranya yaitu:
  - a. Faktor internal yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu yang membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di kawasan tersebut.
  - b. Faktor eksternal yaitu kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan pembangunan yang menganggap masyarakat hanya sekedar objek pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka diketahui masyarakat dengan karakteristik jenis kelamin wanita menganggap dirinya bukan bagian dari anggota musyawarah dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap diadakan pertemuan di desa atau di kecamatan jarang menghadiri

- pertemuan. Hal ini dapat menjadi perhatian bahwa turut mengikutsertakan wanita dalam proses pengambilan keputusan.
2. Masukan untuk Pemerintah Kota Langsa dalam proses perencanaan pembangunan agar dapat dilakukan secara transparan sehingga masyarakat juga dapat mengawasi setiap proses perencanaan maupun pembangunan pada wilayah tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Dasar-dasar evaluasi pendidikan (revised edition)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Deviyanti, D. 2013. Studi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 380-394.
- Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi pembangunan: perkembangan pemikiran dan praktiknya di Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- Koontz, H & O'Donnell, C. 2006. *Principles of management and analysis of management function 5th ed*. McGraw Hill, New York.
- Margono, S. 2003. Membentuk pola perilaku manusia pembangunan. IPB Press, Bogor.
- Nur, F., Bulkis, S., & Naping, H. 2011. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa studi kasus: program alokasi dana desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Pasca Sarjana Universitas Hasanudin*, 1–8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, *Tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah*.
- Rosenfeld, O. 2013. Governance of relocation: An examination of residential relocation processes in housing market renewal areas in England. *Housing studies*, 28(2), 338-362.
- Soetomo. 2008. *Strategi-strategi pembangunan masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sunarti, S. 2003. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan secara berkelompok. *Jurnal Tata Loka*, 5(1).
- Umbara, A. R. 2003. *Kajian relokasi permukiman kumuh nelayan ke rumah susun kedaung kelurahan sukamaju, Bandar Lampung*. Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004. *Tentang Perencanaan Pembangunan*
- Wijaya, R. 2001. *Forum pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan di era otonomi daerah (studi kasus di elurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*. Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.